



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
PROVINSI SUMATERA UTARA
DAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN
PRODUKTIVITAS
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PENINGKATAN KOMPETENSI DAN PEMBERIAN BANTUAN PERMODALAN
BAGI KELOMPOK MASYARAKAT DI KOTA PEMATANGSIANTAR

NOMOR : 100.3.7.1/30/x11-2024

NOMOR : 2/2558/KS.06/XII/2024

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Tiga bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (23-12-2024), bertempat di Kota Medan, yang bertandatangan di bawah ini:

1. SUSANTI DEWAYANI : Wali Kota Pematangsiantar yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-1338 Tahun 2022 tanggal 8 Juni 2022 tentang Pengesahan Pengangkatan Wali Kota dan Pengesahan Pemberhentian Wakil Wali Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Pematangsiantar, yang berkedudukan di Pematangsiantar, Jalan Merdeka Nomor 6, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. AGUNG NUR ROHMAD : Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor:

Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 44 Jakarta Selatan 12710, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- a. PIHAK KESATU adalah Pemerintah Daerah Kota Pematangsiantar yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Pematangsiantar.
- b. PIHAK KEDUA adalah unit kerja eselon I yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja serta produktivitas.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cinta Keria menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 41);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar (Lembaran Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2).

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan kewenangannya masing-masing, sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

- (1) Pelatihan Vokasi adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan untuk bekerja dan/atau berwirausaha.
- (2) Pelatihan Berbasis Kompetensi Kerja adalah pelatihan kerja yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja.
- (3) Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Internasional, dan/atau Standar Khusus.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam rangka sinergi peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan pemberian bantuan permodalan serta membangun kesadaran diri bagi masyarakat di Kota Pematangsiantar.
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi kerja melalui pelatihan berbasis kompetensi, pemberian modal, serta peningkatan literasi guna membangun kesadaran diri bagi masyarakat di Kota Pematangsiantar.

PASAL 3

OBJEK KESEPAKATAN

Objek Nota Kesepakatan yaitu peningkatan kompetensi dan pemberian bantuan permodalan bagi kelompok masyarakat di Kota Pematangsiantar.

PASAL 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. sinergi kerja sama dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia berupa pelatihan bagi kelompok masyarakat pada Unit pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (UPT Bidang Lavotas) yang berada di bawah koordinasi PIHAK KEDUA;
- b. penyiapan bantuan peralatan dan permodalan dari PIHAK KESATU untuk mendirikan usaha mandiri bagi kelompok masyarakat yang telah mengikuti pelatihan vokasi pada UPT Bidang Lavotas; dan
- c. bidang-bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KESATU:
 - a. Menyediakan informasi kebutuhan kompetensi pada pasar kerja di wilayah Kota Pematangsiantar;
 - b. Melaksanakan rekrutmen dan seleksi peserta pelatihan yang berasal dari Kota Pematangsiantar;

- c. Menjalin kerja sama dengan perusahaan yang memiliki sarana dan prasarana pelatihan di Kota Pematangsiantar guna mendukung penyelenggaraan pelatihan;
 - d. Memberikan bantuan permodalan bagi lulusan pelatihan terpilih; dan
 - e. Memberikan pendampingan bagi lulusan pelatihan terpilih dalam rangka peningkatan literasi guna membangun kesadaran diri.
- (2) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA:
- a. Menyediakan sarana dan prasarana pelatihan;
 - b. Menyediakan instruktur dan tenaga pelatihan; dan
 - c. Melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi kompetensi kerja.
- (3) Tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK:
- a. Melakukan analisis kebutuhan pelatihan;
 - b. Melakukan pengembangan program, kurikulum, dan modul pelatihan; dan
 - c. Melakukan pertukaran data dan informasi.

PASAL 6

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Rencana Kerja tersendiri yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban PARA PIHAK, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (2) Untuk melaksanakan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.
- (3) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

PASAL 7

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak penandatanganan dan dapat diperpanjang, diubah dan/atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh salah satu pihak kepada PIHAK yang lain secara tertulis

paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepakatan ini.

- (3) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu PIHAK, dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis untuk mendapatkan persetujuan secara tertulis untuk mendapatkan persetujuan dari PIHAK lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal usulan pengakhiran Nota Kesepakatan ini.

PASAL 8

PENDANAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya atau sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan .

PASAL 9

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, surat menyurat, permohonan, permintaan maupun pelaporan yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini disampaikan pada alamat, nomor telepon dan pos-el, ditujukan kepada personal disebutkan sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

1. Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar

Alamat : Jalan Merdeka No. 6 Kota Pematangsiantar

Telepon : 0623 – 24040

2. Dinas Ketenagakerjaan Kota Pematangsiantar

Alamat : Jl. Dahlia No. 2, Kelurahan Bukit Sofa,
Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar

Pos-El : disnaker@pematangsiantar.go.id

b. PIHAK KEDUA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan

Alamat : Gedung Vokasi Kementerian Ketenagakerjaan, Jalan
Jenderal Gatot Subroto Kaveling 44 Jakarta Selatan 12710

Telepon : (021) 1500630

Pos-El : puuks.lavotas@kemnaker.go.id

- (2) Dalam hal ini terjadi perubahan alamat, nomor telepon dan pos-el yang tercantum dalam Nota Kesepakatan ini, maka PIHAK yang mengubah alamat, nomor telepon dan pos-el tersebut wajib menyampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah perubahan alamat, nomor telepon dan pos-el.

PASAL 10

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara berkala dan/atau sewaktu-waktu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan masing-masing PIHAK termasuk dalam hal terdapat rekomendasi perbaikan atas Nota Kesepakatan ini.

PASAL 11

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) yaitu suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan para pihak yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya maka ketidakmampuan PARA PIHAK untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya bukan merupakan kesalahan.
- (2) *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam gempa bumi, tanah longsor, erupsi gunung api, tsunami, dan banjir, kebakaran, perang, huru hara, sabotase, pemberontakan masyarakat, dan kebijakan-kebijakan pemerintah Republik Indonesia yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.
- (3) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka PIHAK yang terkena *force majeure* harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya *force majeure*.
- (4) Segala kerugian yang timbul disebabkan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya dalam Nota Kesepakatan ini.

PASAL 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Segala perselisihan yang timbul sehubungan dengan isi, penafsiran, maupun pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah mufakat.
- (2) Selama proses musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK tetap berkewajiban melaksanakan seluruh ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini, kecuali untuk hal-hal yang sedang dalam proses penyelesaian perselisihan.

PASAL 13

ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini maupun perubahan yang perlu dilakukan, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan (adendum) yang disepakati PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

PASAL 14

PENUTUP

- (1) Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepakatan ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (3) Nota Kesepakatan ini mulai berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



AGUNG NUR ROHMAD

PIHAK KESATU,



SUSANTI DEWAYANI

PIPIRAN

KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
DENGAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

TANG

INGKATAN KOMPETENSI DAN PEMBERIAN BANTUAN PERMODALAN
KELOMPOK MASYARAKAT DI KOTA PEMATANGSIANTAR

MOR :

MOR : 2/2558/KS.06/XII/2024

GGAL : 23-12-2024

PEKERJAAN	JUMLAH	SATUAN	PENANGGUNG JAWAB	2025	2026	2027
Penyiapan sumber daya manusia yang akan dilatih sesuai dengan potensi wilayah.	750	Orang	PIHAK KESATU	150	250	350
- Menyediakan informasi kebutuhan pasar kerja. - Pelaksanaan rekrutmen dan seleksi peserta pelatihan.						
Pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi kompetensi kerja sesuai kebutuhan dan potensi wilayah.	750	Orang	PIHAK KEDUA	150	250	350
- Menyediakan sarana dan prasarana pelatihan. - Menyediakan instruktur dan tenaga pelatihan - Pelaksanaan pelatihan						
Menjalin kerja sama dengan perusahaan yang memiliki sarana	1	Kegiatan	PIHAK KESATU			

PEKERJAAN	JUMLAH	SATUAN	PENANGGUNG JAWAB	2025	2026	2027
dan prasarana pelatihan di Kabupaten (daerah).						
Memberikan bantuan permodalan bagi lulusan pelatihan terpilih	300	Paket	PIHAK KESATU	100	100	100
Memberikan pendampingan bagi lulusan pelatihan	300	Paket	PIHAK KESATU	100	100	100

PIHAK KEDUA,



AGUNG NUR ROHMAD

PIHAK KESATU,



SUSANTI DEWAYANI